

**WEWENANG PENGAWASAN DPR
BERDASARKAN PASAL 20A AYAT (1) UUD 1945
DALAM BINGKAI ASAS DEMOKRASI**

SKRIPSI

**Oleh:
Jordy Debastri
201710115215**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : WEWENANG PENGAWASAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT (DPR)
BERDASARKAN PASAL 20A AYAT (1)
UUD 1945 DALAM BINGKAI ASAS
DEMOKRASI

Nama Mahasiswa : Jordy Debastri

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115215

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum



LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : WEWENANG PENGAWASAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT (DPR)
BERDASARKAN PASAL 20A AYAT (1)
UUD1945 DALAM BINGKAI ASAS
DEMOKRASI

Nama Mahasiswa : Jordy Debastri

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115215

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Juli 2021

Bekasi, 28 Juli 2021

MENGESAHKAN,

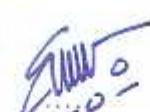
Ketua Tim Penguji

: Dr. Hotma P. Sibuea, SH, M.P
NIDN. 0323035802



Penguji I

: Elfirda Ade Putri, SH, MH
NIDN. 0306018804



Penguji II

: Esther Masri, SH, M.Kn
NIDN. 0312017904

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

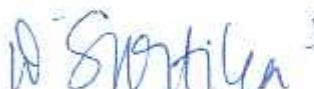
Dekan

Ilmu Hukum

Fakultas Hukum


Clara Ignatia Tohing, SH, MH

NIDN. 0314029002


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM

NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jordy Debastri

NPM : 201710115215

TTL : Lakitan, 09 Juni 1998

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Berdasarkan Pasal 20A Ayat (1) UUD1945 Dalam Bingkai Asas Demokrasi*" adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur lainnya.

Bekasi, 28 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



Jordy Debastri

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jordy Debastri
NPM : 201710115215
TTL : Lakitan, 09 Juni 1998
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:
**“WEWENANG PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)
BERDASARKAN PASAL 20A AYAT (1) UUD1945 DALAM BINGKAI
ASAS DEMOKRASI”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 28 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



Jordy Debastri

ABSTRAK

Jordy Debastri. 201710115215. Wewenang Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Berdasarkan Pasal 20A Ayat (1) UUD 1945 Dalam Bingkai Asas Demokrasi.

Indonesia adalah negara demokrasi sebagaimana yang disebutkan dalam konstitusi, dalam mewujudkan demokrasi itu maka ada dua model demokrasi, demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung (perwakilan). Demokrasi langsung yakni rakyat memilih secara langsung wakilnya, kemudian terbentuknya lembaga perwakilan sebagai wadah para wakil yang terpilih. Terbentuknya lembaga perwakilan diharapkan dapat menyalurkan kehendak rakyat, lembaga perwakilan yang utama dalam merealisasikan rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR memiliki 3 fungsi, fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pada pendekatan konseptual menggunakan teori demokrasi, teori sistem pemerintahan presidensial, dan teori lembaga perwakilan. Untuk memahami penelitian ini penulis tidak menggunakan metode analisis melainkan metode penafsiran.

Hasil penelitian yang penulis lakukan, dalam menjalankan fungsi pengawasan, ternyata ada tiga faktor yang menghambat. *Pertama*, sistem pengisian jabatannya. Dalam sistem pengisian jabatan DPR dipilih melalui Pemilihan Umum (Pemilu) lewat partai politik (parpol). *Kedua*, Penerapan ambang batas. Dalam penerapan ambang batas yang kurang efektif sehingga tidak menjadikan kepartaian sederhana. *Ketiga*, fraksi di lembaga DPR. Pada saat ini fraksi di lembaga DPR jauh dari kata seimbang, karena tidak adanya pembatasan mengenai gabungan fraksi parpol.

Kata Kunci: *Demokrasi, Dewan Perwakilan Rakyat, pengawasan.*

ABSTRACT

Jordy Debastri. 201710115215. *The Supervisory Authority of the House of Representatives Based on Article 20A Paragraph (1) of the 1945 Constitution in the Frame of the Principles of Democracy.*

Indonesia is a democratic country as stated in the constitution, in realizing democracy there are two models of democracy, direct democracy and indirect (representative) democracy. Direct democracy, namely the people directly elect their representatives, then the formation of a representative institution as a forum for the elected representatives. The formation of a representative institution is expected to channel the will of the people, the main representative institution in realizing the people is the House of Representatives. The House of Representatives has 3 functions, the legislative function, the budget function, and the supervisory function.

The research method used is normative research with a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The conceptual approach uses the theory of democracy, the theory of presidential government systems, and the theory of representative institutions. In the comparative approach, the researcher compares the existing government system in Indonesia with other countries in order to strengthen the author's argument. To understand this research, the writer does not use the analytical method but the interpretation method.

The results of the research that the author did, in carrying out the supervisory function, it turned out that there were three inhibiting factors. First, the position filling system. In the system for filling the positions of the House of Representatives, the People's Representative Council is elected through General Elections through political parties. Second, the application of the threshold. In the application of the threshold that is less effective so that it does not make the party simple. Third, the faction in the House of Representatives. Currently, the factions in the House of Representatives are far from balanced, because there are no restrictions on the combination of political party factions.

Keywords: Democracy, House of Representatives, supervisory.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillaahi rabbil alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kuasa-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini berjudul **“WEWENANG PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) BERDASARKAN PASAL 20A AYAT (1) UUD 1945 DALAM BINGKAI ASAS DEMOKRASI”**. Sholawat serta salam penulis panjatkan semoga senantiasa selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan tanpa bantuan dan bimbingan serta dorongan dari banyak pihak, oleh karena itu dengan tulus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orangtua saya yang selalu menjadi penyemangat setiap masa dan setiap saat.
2. Bapak Irjen Pol (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Dr. Dwi Atmoko, SH, MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Ibu Elfirda Ade Putri, SH, MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sekaligus Dosen Pengaji I dalam Sidang Skripsi yang memberikan kritik dan saran yang bermanfaat untuk penelitian ini.
6. Bapak Dr. Hotma P. Sibuea SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I/Materi sekaligus Ketua Pengaji dalam Ujian/Seminar Proposal Skripsi dan Sidang Skripsi yang selalu membantu saya dalam memperdalam materi pada penelitian ini.
7. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung SH, MH, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sekaligus Dosen

Pembimbing II/Teknis yang membantu saya dalam menyusun proposal hingga skripsi dengan Teknik penulisan yang sebaik mungkin.

8. Bapak Dr. Awaluddin Marwan SH, MH, MA selaku Dosen Penguji I pada saat Ujian/Seminar Proposal Skripsi yang telah memberikan arahan serta memudahkan kelanjutan skripsi.
9. Ibu Dr. Lusia Sulastri, SH, MH, selaku Dosen Penguji II pada saat Ujian/Seminar Proposal Skripsi yang telah memberikan arahan serta memudahkan kelanjutan skripsi.
10. Ibu Esther Masri, SH, M.Kn, selaku Dosen Penguji II pada saat Sidang Skripsi yang telah memberikan kritik dan saran yang bermanfaat bagi penulisan ini.
11. Ibu Diana Fitriana SH, MH, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
12. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
13. Kepada kakak-kakak saya yaitu Abang Arief, Ka Devi, dan Bang Ade yang selalu mendukung dan memberikan arahan,
14. Kepada orang spesial yang selalu membantu proses belajar perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi yaitu Adinda Farah Anisa.
15. Kepada teman-teman selama Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang selalu saling mendukung dan bertukar informasi, yaitu Adit, Adinda, Donny, Andrew. Chandra, Jessha, Firda, dan Annisa.
16. Kepada sahabat yang selalu menghibur dan selalu ada disaat senang maupun susah, yaitu Ferdy, Adek, Adinda.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna seperti yang diharapkan. Seiring dengan itu, penulis mengharapkan kritik yang konstruktif serta bimbingan dari para penguji agar menjadi pedoman bagi penulis di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga penulis dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua.

Bekasi, 28 Juli 2021

Jordy Debastri
NPM. 201710115215

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Perumusan Masalah	3
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
14.1 Tujuan Penelitian	4
14.2 Manfaat Penelitian	4
1.5 Kerangka Teoritis	4
1.6 Kerangka Konseptual	12
1.7 Kerangka Pemikiran	13
1.8 Sistematika Penulisan	13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Wewenang	15
21.1 Pengertian Wewenang	15
21.2 Sumber Wewenang	16
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pengawasan	17
2.3 Tinjauan Umum Tentang Demokrasi	18
23.1 Pengertian dan Konsep Dasar Demokrasi	18
23.2 Ciri-ciri Demokrasi	25

233	Macam-macam Demokrasi.....	28
2.4	Tinjauan Umum Tentang Sistem Perwakilan	31
24.1	Pengertian dan Konsep Sistem Perwakilan	31
24.2	Sistem Perwakilan Berdasarkan UUD 1945 Amandemen	38
24.3	Teori-Teori Sistem Perwakilan	48
2.5	Tinjauan Umum Tentang Fungsi Lembaga Perwakilan	50
25.1	Pengertian dan Konsep Lembaga Perwakilan	50
25.2	Fungsi Lembaga Perwakilan	51
25.3	Macam-macam Lembaga Perwakilan di Indonesia.....	55

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian.....	69
3.2	Pendekatan Penelitian	69
3.3	Sumber Bahan Hukum.....	70
3.4	Metode Pengumpulan Bahan Hukum	71
3.5	Metode Analisis Bahan Hukum	72

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR Jika berpedoman pada Peraturan perundang-undangan Saat Ini Ditinjau Asas Demokrasi	73
4.2	Peraturan Perundang-undangan Yang Ideal Dalam Mendukung Fungsi Pengawasan	84

BAB V. PENUTUP

5.1	Kesimpulan	87
5.2	Saran	88
	DAFTAR PUSTAKA	89
	RIWAYAT HIDUP PENULIS	94

DAFTAR SINGKATAN

LAMBANG/SINGKATAN	Arti dan Keterangan
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
PEMILU	Pemilihan Umum
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPD	Dewan Perwakilan Daerah
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat
PARPOL	Partai Politik
UUD 1945	Undang-Undang Dasar 1945
RUU	Rancangan Undang-Undang
UU	Undang-Undang



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Jadilah Padi, Semakin Tinggi Semakin Merunduk.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Orangtua tercinta serta kakak-kakakku tersayang yang telah banyak berkorban dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada Adinda, Terima kasih selama ini selalu ada, selalu mendukung apapun kondisinya. Serta kepada sahabat-sahabatku.